

MANAJEMEN PENGELOLAAN HUTAN PRIBADI DI DESA SINTUWU KECAMATAN PALOLO KABUPATEN SIGI

Abd Rasid¹⁾, Adam Malik²⁾, Andi Sahri Alam²⁾

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu, Central Sulawesi 94118

¹⁾Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Korespondensi: Abdrasid826@ymail.com

²⁾ Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Abstract

Private forest is a concept of forest management that places society as the main sector in maintaining and using forest function, while the government has role as facilitator that supports the farmers community. The management and the development of private forest in Sintuwu village Palolo subdistrict is a collaboration of Forestry and Plantation Department of Sigi District. The research was conducted for three months, began on April up to the month of June 2015, located in Sintuwu village Palolo subdistrict Sigi district. The research aimed to find out of how the process of Private Forest Management was done by the society. Data gathering was done by observing and interviewing with questionnaire. The data gathered analyzed descriptively. The result of the research showed that the management program of the private forest that made by Forestry and Plantation by full involvement of farmers community of Sintuwu village that established, and based on the result of interviewing the respondents of the farmers community who said that less attention from Forestry and Plantation Department then the Private Forest management was done individually without any coordination. All farmers community did the private forest management that included infrastructure, planting area management, planting, maintaining and supervising by their own ways without monitoring by the government, therefore at the end of the planting the plant, it was ignored for them less of information and no coordination of the Forestry and Plantation Department about the next step that should be done in relation to the Private Forest management itself.

Keywords: *Institution, Society and Government, Private Forest*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan berbagai manfaat bagi kesejahteraan manusia baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Seiring dengan pertambahan penduduk, ekonomi dan industrialisasi menyebabkan tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Untuk melestarikan dan mengupayakan pemanfaatan hutan dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan berbagai kawasan tertentu untuk dijadikan kawasan hutan produksi, hutan

lindung atau hutan konservasi (Sadono, 2013). Hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya tidaklah semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tetapi juga terwujud sebagai suatu hubungan dimana manusia mempengaruhi dan merubah lingkungannya (Juhadi, 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat 2 bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai kesatuan ekosistem hutan memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi

untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari (Wilujeng, 2015).

Hutan rakyat merupakan kegiatan pengelolaan hutan pada lahan hak milik rakyat, yang umumnya dilakukan pada lahan-lahan tegalan dan pekarangan dengan hasil yang diambil dapat berupa kayu maupun non kayu. Tujuan penanaman hutan milik dengan tanaman keras atau tahunan tidak sekedar didasari motif ekonomi atau produksi saja tetapi juga motif ekologi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, sehingga tanaman kayu pada hutan rakyat merupakan tabungan masyarakat, pemanenannya dilakukan disaat yang dibutuhkan (Rahmina, 2011).

Hutan Rakyat Di Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi merupakan salah satu Program Pemerintah Kabupaten Sigi yang bertujuan merehabilitas lahan-lahan masyarakat di Desa Sintuwu dengan memberikan bibit dengan berbagai jenis tanaman. Pemerintah melaksanakan pembagian jenis tanaman di lahan masyarakat seluas 60 Ha di Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, dengan harapan agar masyarakat dapat mengoptimalkan lahan-lahan mereka sebagai tempat pendapatan dibidang ekonomi dan ekologis bagi Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.

Dengan adanya upaya kegiatan pengelolaan dan pengembangan hutan rakyat di Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi berdasarkan kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sigimaka perlu diadakan penelitian mengenai proses pengelolaannya, sehingga dapat menjadi sumber tambahan pendapatan masyarakat dimasa akan datang sekaligus dapat mewujudkan hutan yang lestari.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji dari penelitian ini adalah bagaimana proses pengelolaan hutan rakyat di Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi dengan melibatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam pengelolaannya ?

Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Pengelolaan Hutan Rakyat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mahasiswa tentang pengelolaan hutan rakyat sekaligus informasi dan input bagi masyarakat umum tentang cara pengelolaan hutan rakyat.

METODE PENELITIAN

Waktu dan tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2015 yang bertempat di Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Biromaru. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu desa yang sedang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan selama penelitian adalah kamera sebagai media dokumentasi, Recorder, serta alat tulis menulis untuk mencatat data atau informasi dari wawancara yang akan dilakukan.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar pertanyaan sebagai bahan dalam kegiatan wawancara.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Metode survey dengan teknik wawancara digunakan untuk mengetahui pengelolaan hutan rakyat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan (panduan pertanyaan) yang bersifat mendalam. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), yang diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam sehingga dapat menunjang kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Responden dipilih secara purposive (sengaja), dimana jumlah responden terdiri atas 20 orang yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan rakyat, responden tersebut dipilih berdasarkan dari jumlah kelompok tani di Desa Sintuwu sebanyak 25 orang dengan pertimbangan bahwa responden adalah aparat desa (2 orang), kelompok tani hutan rakyat (16 orang), dan tokoh masyarakat (2 orang). Sehingga dapat memberikan penjelasan tentang pengelolaan hutan rakyat.

Dalam melakukan teknik sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih oleh penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Responden merupakan masyarakat setempat (penduduk asli/pendatang).
- Masyarakat yang memiliki lahan Hutan Rakyat di Desa Sintuwu.

Analisis Data

Analisis data digunakan analisis deskriptif yang berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat antara lain; Kegiatan pengelolaan hutan rakyat (aturan mengenai pengelolaan hutan rakyat dan pola tanam hutan rakyat), kegiatan pengelolaan hutan rakyat (pembuatan sarana dan prasarana, penataan area tanam, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan). Dengan menggunakan metode diatas, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasi arti data-data yang terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan di lapangan, menjelaskan bahwa pengelolaan hutan rakyat di Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi tersebut dibentuk sejak Tahun 2014 dengan luas area pengelolaan 60 ha dengan berjumlahkan

kelompok tani yang mengelola sebanyak 25 orang dengan jenis tanaman yang didalamnya yaitu Trembesi, Nantu dan Kemiri, yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) bidang Kehutanan. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Sintuwu.

Nama Desa	Jumlah Kelompok Tani (orang)	Luas Lahan (ha)	Jenis Tanaman	Sumber Dana
Sintuwu	25	60	Trembesi Nantu Kemiri	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan

Menurut Departemen Kehutanan (1995) dalam Afriantho (2008), hutan rakyat sebagai salah satu bentuk hutan kemasyarakatan yang dimiliki oleh masyarakat atau rakyat, baik secara perorangan, kelompok, maupun swasta ataupun badan usaha masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan hasil hutan serta pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya ketentuan luas lahan minimal untuk dapat disebut sebagai hutan rakyat adalah sebesar 0.25 ha dengan penutupan lahan oleh tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50% dan atau pada tahun pertama sebanyak 500 batang setiap hektarnya.

Pembahasan

Pengelolaan Hutan Rakyat

Pada dasarnya hutan rakyat merupakan suatu lahan yang didominasi tanaman berkayu, yang berada di atas lahan milik rakyat. Dengan demikian, tanaman berkayu yang terdapat pada lahan tersebut merupakan tanaman yang diupayakan oleh masyarakat.

Hasil yang diperoleh pada Kegiatan pengelolaan hutan rakyat di Desa Sintuwu masyarakat menganggap bahwa menanam lahan dengan tanaman kayu-kayuan akan lebih mempunyai harapan untuk menopang kehidupan. Kegiatan pengelolaan hutan rakyat ini dimulai dengan kegiatan pembuatan sarana dan prasarana, penataan area tanam, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan.

Pembuatan hutan rakyat di Desa Sintuwu ini belum melewati sejarah yang cukup panjang, sebab pembuatan hutan rakyat ini baru dimulai sejak tahun 2014 silam hingga sekarang.

Pembuatan hutan rakyat ini terbentuk atas keinginan dari kelompok tani Desa Sintuwu dengan pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sigi. Yaitu peran pemerintah sangatlah penting bagi masyarakat desa tersebut sebab pemerintahlah yang memfasilitasi kegiatan hutan rakyat dengan memberikan kebutuhan bibit di antaranya: Trembesi (*Samanea Sp*), Nantu (*Genua Sp.*) dan Kemiri (*Aleurites Maluccana*).

Di lain hal, pengetahuan masyarakat khususnya para petani mengenai pengelolaan hutan rakyat masih sangat rendah. dikarenakan secara teori pengelolaan hutan rakyat masih merupakan hal yang baru bagi masyarakat Desa Sintuwu. Oleh sebab itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami lebih jelas bagaimana sistem atau cara pengelolaan hutan rakyat dengan baik dan benar sehingga masyarakat membutuhkan pendampingan dan kerja sama dengan Pemerintah.

Selain itu pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat yang tidak tergabung dalam kelembagaan kelompok tani biasanya melakukan pengelolaan hutan rakyat dengan cara mereka sendiri. Sistem yang mereka gunakan masih juga terbilang sederhana, padahal apabila ada keterlibatan pemerintah parah petani dapat menambah ilmu pengetahuan mereka dalam bercocok tanam. Misalnya dalam pemilihan bibit sampai pada pemanenan, dukungan kelembagaan yang dapat diperoleh dimulai dari pemilihan jenis, pembibitan, teknik penanaman, teknik pemeliharaan (pemangkasan dan penjarangan), pengumutan hasil dan pemasaran.

Sebagian besar para petani hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar saja, bahkan terdapat lebih banyak petani yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sehingga mereka tidak dapat membaca dan menulis. Oleh sebab itu, pengetahuan mereka hanya pada pengetahuan seputar pertanian yang menjadi sumber pendapatan yang diperoleh dengan pengalaman dasar yang mereka miliki selama ini. Mamahit (2013), Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk dapat mengerjakan sesuatu

lebih cepat dan tepat, dengan demikian semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar kinerja yang dapat dicapai.

Pendidikan menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Desa Sintuwu membutuhkan pendampingan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam program tersebut. Karena tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi pola pikir dari masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan tindakan, namun dibalik keterbatasan pendidikan masyarakat Desa Sintuwu juga tertarik dengan adanya program pemerintah mengenai pengelolaan hutan rakyat meskipun belum mengetahui dengan pasti bagaimana pengelolaannya oleh sebab itu masyarakat mendukung dalam pembuatan program yang diajukan oleh pemerintah tersebut untuk mengetahui pasti manfaat apa saja dari pengelolaan hutan rakyat yang dapat dirasakan. KemenHut (2014), tingginya tingkat pendidikan masyarakat memungkinkan masyarakat lebih cepat menerima dan memberikan respon terhadap hal-hal yang membutuhkan kemampuan berpikir dari inovasi-inovasi baru yang dianjurkan kepadanya. Ketertarikan mereka disebabkan beberapa hal berikut:

1. Tanaman hutan rakyat dapat dijadikan sebagai pelindung tanaman pertanian yang ada disekitarnya.
2. Tanaman hutan rakyat dinilai masyarakat sangat menjanjikan dari segi ekonomi sebab mampu menjadi investasi jangka panjang oleh masyarakat.
3. Tanaman hutan rakyat juga dapat digunakan menjadi industri rumah tangga sehingga mampu menjadikan masyarakat lebih mandiri, kreatif dan menjadikan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat.
4. Masyarakat juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya melestarikan hutan.

Bagi masyarakat sekitar hutan keberadaan hutan sangat berarti untuk keberlangsungan hidupnya, mereka bergantung pada sumberdaya yang ada di hutan yang akan memberikan nilai tambah bagi kehidupannya (Ardiansyah, 2008). Hampir setengah dari total jumlah penduduk di

Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan hidupnya kepada hutan (Widiarti A *et al.*, 2008).

Aturan-Aturan Mengenai Pengelolaan Hutan Rakyat

Dalam pengelolaan hutan rakyat di desa Sintuwu, tidak banyak aturan yang diterapkan oleh kelompok tani dan pemerintah yang terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Sigi. Penerapan aturan yang di berikan oleh kedua pihak sangat sederhana saja. Bagaimana masyarakat mampu mengelola lahan mereka sendiri untuk kesejahteraan masyarakat tersebut. Dimana pemerintah memberikan bimbingan dalam mengelolah hutan rakyat agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Mehut-II/2012 sebagaimana dimaksud dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kemandirian ekonomi rakyat, dan ketersediaan data dan informasi hasil hutan/rakyat (Kementerian Kehutanan, 2015).

Pola Tanam Hutan Rakyat di Desa Sintuwu

Secara fisik hutan rakyat memiliki pola tanam yang beragam dan berbeda di setiap daerah, baik cara memilih jenis yang dikembangkan maupun cara penataannya di lapangan seperti yang dilakukan oleh masyarakat petani Desa Sintuwu dalam menerapkan pola tanam, yaitu dengan pola tanam campuran (Polyculture).

Masyarakat Desa sintuwu menerapkan pola tanam campuran atau Hutan Rakyat Campuran ini karena pohon yang mereka tanam di lahan hutan rakyat itu lebih dari satu jenis tanaman kehutanan yang mereka kembangkan dan usahakan saat ini, dari segi silvikultur masyarakat memilih cara ini lebih baik dari pada pola tanam monokultur/murni yang hanya menanam satu jenis tanaman kehutanan saja dan dari segi ekonominya kurang menguntungkan bagi masyarakat setempat berbeda dengan pola tanam campuran dimana dengan pola tanam campuran ini masyarakat bisa memilih dan menanam tanaman kehutanan lebih dari satu jenis tanaman, sehingga daya

tahan terhadap hama penyakit dan angin lebih tinggi.

Menurut Soeseno (1983) dalam Rachman *et al.*, (2008) penentuan jenis untuk pembuatan hutan atas dasar dugaan semata sangat besar resikonya. Salah pilih dalam menentukan jenis dapat mengakibatkan banyak tanaman yang mati, pertumbuhan tak normal bahkan gagal sama sekali. Hal ini karena jenis-jenis tanaman hutan di Indonesia sangat banyak ragamnya dan setiap jenis mempunyai daerah penyebaran tersendiri, sehingga tidak semua jenis dapat tumbuh dengan baik di sembarang tempat.

Selain itu juga masyarakat sintuwu menerapkan pola tanam campuran dengan sistem agroforestry/wanatani yang mana pola ini merupakan bentuk usaha kombinasi antara tanaman kehutanan dengan cabang usaha lainnya seperti perkebunan dan pertanian. Dengan tanaman pertanian seperti buah-buahan, ditanaman perkebunan seperti coklat yang bisa meningkatkan pendapatan petani lewat panen harian, mingguan, bulanan dan tahunan juga menjaga kelestarian lingkungan (ekologi) karena pola ini berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan lahan secara rasional baik dari aspek ekologi, ekonomi, maupun aspek sosial budaya, sehingga diharapkan tercapai kelestarian; lestari lingkungan, lestari hasil dan lestari pendapatan.

Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat Pembuatan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu kelompok tani menjelaskan bahwa pembuatan gubuk kerja tidak ada karena gubuk yang mereka gunakan milik warga yang sudah ada diarea tersebut, sedangkan papan pengenal juga tidak dibuat karena lahan terpisah-pisah atau lahan milik petani tidak berurutan.

Penataan Area Tanaman

Pembersihan lubang tanaman dilakukan sendiri-sendiri dilahan anggota kelompok tani. Pemasangan batas area tidak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan perbedaan lokasi tempat tempat penanaman.

Pemantauan lahan yang telah dilakukan oleh masyarakat atau kelompok tani sama sekali tidak dipantau oleh dinas terkait, anggota kelompok tani hanya memberi tahu luas lahan

yang mereka ikutkan tanpa dicek terlebih dahulu oleh dinas terkait dan dijumlahkan dengan luas lahan anggota kelompok lainnya. Dari jumlah keseluruhan lahan ditentukan jumlah bibit yang diberikan.

Penanaman

Sebelum penanaman dilakukan, kegiatan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemilik lahan di lokasi penanaman adalah pembuatan larikan, kemudian pembuatan piringan tanaman dengan diameter 1 meter. Setelah itu dilakukan pembuatan lubang tanaman, lalu dibiarkan selama 1-2 minggu dengan tujuan supaya tanahnya gembur (Safitri, 2009).

Akhir dari kegiatan fisik lapangan adalah penanaman tanaman pada lubang tanam dengan memperhatikan hari hujan pada setiap tahun dengan diawali pengakutan bibit dan penyebaran pada masing-masing lubang tanam. Keadaan curah hujan menjadi perhatian khusus bagi petani karena sumber air pada kawasan hutan sangat jauh dan bahkan sulit dijangkau serta jumlah tanaman yang begitu banyak yang menyulitkan anggota kelompok tani untuk melakukan penyiraman. Sejalan dengan penjelasan dari Mindawati dan Megawati (2013), penanaman dilakukan pada awal musim hujan, yaitu setelah curah hujan cukup merata sekitar intensitas 100 mm/hari atau tanah telah basah sampai kedalaman 30 cm.

Penanaman dilakukan di dalam lahan masyarakat yang telah ditanami dengan jenis tanaman pertanian seperti kakao dan cabai. Penanaman pohon sesuai keinginan anggota kelompok tani tanpa ada yang mengawasi. Jadi penanaman yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan sistem tumpangsari tapi tidak menanam searah barisan atau menggunakan jalur dan kontur.

Hal ini tentu akan membuat pertumbuhan tanaman hingga hasilnya tidak akan memberikan sesuai dengan apa yang diharapkan dan diprogramkan. Dalam kegiatan ini tentunya perlu bimbingan dan pemantauan dari para Dinas yang terkait khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menyelenggarakan program hutan rakyat di Desa Sintuwu Kecamatan Palolo.

Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan, pedangiran dan penyulaman. Kegiatan ini dilakukan pada tanaman tahun berjalan sampai umur 3 tahun. Penyiangan dan pedangiran dilakukan untuk membebaskan tanaman dari jenis-jenis tanaman pengganggu (rumput liar). Untuk penyiangan dengan sistem cemplongan penyiangan dilakukan menyeluruh karena yang harus disaingi tidak hanya tanaman pokoknya tetapi juga tanaman palawija. Penyiangan dilakukan dengan radius lebih kurang 50 cm, sedangkan penggemburan tanah lebih kurang 25 cm sekeliling tanaman (Sitanggang, 2009).

Pemeliharaan yang dilakukan oleh kelompok tani berupa tanaman yang mati tidak ada penyulaman kembali atau penggantian tanaman yang mati dan pemupukanpun tidak ada diberikan oleh Dinas Kehutanan tapi mereka tetap membersihkan tanaman yang masih hidup dari serangan gulma. Pemeliharaan tahun kedua tidak ada dilakukan sampai tahun ketiga dan tahun seterusnya.

Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait dengan kegiatan hutan rakyat dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten sigi sampai sekarang tidak pernah datang untuk meninjau hasil tanaman hutan rakyat yang telah ditanami oleh masyarakat dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Belum ada realisasi tentang keberadaan tanaman hutan rakyat yang ada di Desa Sintuwu dan kelompok tani hanya membiarkan saja tanaman yang mereka tanam.

Dalam kegiatan ini tentunya sangat diperlukan pengarahan dan bimbingan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dimana hal apa saja yang akan dilakukan demi berjalannya program hutan rakyat ini hingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Jika tidak program ini hanya berjalan dengan begitu saja dan tidak akan memberikan perubahan bagi masyarakat khususnya lagi para kelompok tani tersebut.

Dalam kegiatan ini tentunya sangat diperlukan pengarahan dan bimbingan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dimana

hal apa saja yang akan dilakukan demi berjalannya program hutan rakyat ini hingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Jika tidak program ini hanya berjalan dengan begitu saja dan tidak akan memberikan perubahan bagi masyarakat khususnya lagi para kelompok tani tersebut.

Penyebab utama terjadinya berbagai kelemahan, termasuk kegagalan dalam menjaga eksistensi dan pelestarian sumberdaya hutan adalah terutama karena adanya keragaman pandangan, kepentingan dan tujuan dari berbagai pihak, baik sektor pemerintahan dunia usaha serta masyarakat baik lokal, nasional maupun global dalam penekanan prioritas pengelolaan sumberdaya hutan dan pemanfaatan kawasan hutan. Ketidakberhasilan dalam membangun kesepahaman dan terwujudnya harmonisasi atas berbagai perbedaan tersebut, telah menimbulkan dampak negatif terhadap sumberdaya hutan berupa deforestasi dan degradasi hutan yang cenderung semakin meningkat. (BALITBANG Kehutanan, 2009).

Harapan dari para kelompok tani pengelolaan hutan rakyat ialah untuk terus bekerja sama antar masyarakat dengan Pemerintah dalam program tersebut, tidak hanya pada batas pendanaan dan pengadaan bibit saja akan tetapi koordinasi dari Pemerintah seperti pemantauan dan pengarahan yang menyangkut dengan kesuksesannya program pengelolaan hutan rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Program pengelolaan hutan rakyat yang dibuat oleh Dinas kehutanan dan Perkebunan dengan melibatkan penuh pada kelompok tani Desa Sintuwu yang telah dibentuk, berdasarkan hasil wawancara dari responden kelompok tani mengatakan justru masih kurang penanganan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan sehingga pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh kelompok tani bisa dikatakan berjalan sendiri-sendiri tanpa terkoordinir dengan baik. Seluruh

kelompok tani melakukan pengelolaan hutan rakyat baik dari sarana dan prasarana, penataan area tanam, penanaman, pemeliharaan sampai pengawasan dengan sistem sendiri-sendiri dan tanpa pemantauan dari pemerintah, sehingga diakhir penanaman tanaman tersebut tergolong terabaikan karena kelompok tani kurang dalam informasi dan kurang terkoordinir dari Pemerintah Dinas Kehutanan dan Perkebunan dari hal apa saja yang akan mereka lakukan berikutnya menyangkut pengelolaan hutan rakyat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriantho, 2008. *Prospek Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor*. SKRIPSI. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor.
- Ardiansyah. S, 2008. *Kajian Interaksi Masyarakat dengan Hasil Hutan Non Kayu (Study Kasus KPH di Bayuwangi Utara, Perum Perhutani Unit II Provinsi Jawa Timur)*. Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
- BALITBANG Kehutanan, 2009. *Perubahan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Juhadi, 2007. *Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Pebukitan*. Jurnal Geografi. FIS UNNES.
- KemenHut, 2014. *Social Forestry di Sulawesi*. Kementerian Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Makassar.
- Kementerian Kehutanan, 2015. *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Mamahit, 2013. *Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Kepuasan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. 1(4): 936-945.

- Mindawati, Megawati, 2013. *Manual Budidaya Mahoni*. BALITBANG Kehutanan dan Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan. Jakarta.
- Rachman, Asep Aditya, 2008. *Evaluasi Penerapan Pola Tanam Jenis Pohon Potensial Pada Hutan Rakyat*. BALITABANG Kehutanan. Ciamis.
- Rahmina, 2011. *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. GIZ dan FORCLIME. Jakarta.
- Sadono, 2013. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Biro Penerbit Planologi Undip.
- Safitri, 2009. *Identifikasi dan Inventarisai Pengelolaan Hutan Rakyat di Kecamatan Biru-Biru*. Fakultas Pertanian. Departemen Kehutanan USU. Medan.
- Sitanggang, 2009. *Manfaat Ekonomi Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat*. SKRIPSI. Fakultas Pertanian. Departemen Kehutanan USU. Medan.
- Widiarti, A. Dan Sukaesih, P. 2008. *Karakteristik Hutan Rakyat Pola Kebun Campuran*. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam. Bogor.
- Wilujeng, 2015. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fisip. Universitas Airlangga. ISSN: 2303-341X.